

Membongkar represi digital: analisis wacana kritis perlawanan mahasiswa pada kanal youtube forum keadilan TV

Safitri Rahmadhaniati*, Roziana Febrianita

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

*Email Korespondensi: safitriirahma56@student.upnjatim.ac.id

Diterima: 11 Juli 2026; Direvisi: 27 Oktober 2026; Terbit: 30 Oktober 2026

Abstract

The decline in public trust toward the government, worsened by the failure to address basic welfare, has triggered critical responses from student groups. These criticisms, however, are increasingly met with digital repression, forcing activists to turn to alternative media. This study aims to analyze the resistance narrative and regime-delegitimization strategies presented in the podcast episode "Nyala Api di Jalan Sunyi Perjuangan" on the Forum Keadilan TV YouTube channel. Using a qualitative approach grounded in Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis (CDA), which covers the micro (textual), meso (discursive practice), and macro (sociocultural) dimensions, this study uncovers the ideology embedded within the speaker's statements. The findings show that the speaker, a student activist, employs seven linguistic tactics including reductive irony, metaphor, binary opposition, extreme moral labeling, resistance diction, personal-systemic separation rhetoric, and transversal-solidarity rhetoric marked by distinctive phrases such as "catering state" and "outsourced labor". At the meso level, the independent channel functions as an uncensored distribution catalyst that reached more than one million viewers and prompted active audience reproduction of the narrative. At the macro level, the resistance narrative is a direct response to a broader legitimacy crisis and systemic digital repression. The study concludes that the digital counter-public sphere effectively facilitates the delegitimization of the regime's moral and intellectual authority, confirming that civil society's political resistance has substantially shifted toward the digital sphere.

Keywords: *Critical discourse analysis; resistance narrative; regime delegitimization; counter public sphere; digital repression.*

Abstrak

Penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah yang diperparah oleh kegagalan penanganan kesejahteraan memicu respons kritis dari kalangan mahasiswa. Namun, kritik tersebut kerap dibalas dengan represi digital, sehingga memaksa aktivis menggunakan media alternatif untuk menyuarakan pendapatnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis narasi perlawanan dan strategi delegitimasi rezim dalam episode sinar "Nyala Api di Jalan Sunyi Perjuangan" pada kanal YouTube Forum Keadilan TV. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough yang mencakup dimensi mikro (tekstual), meso (praktik diskursif), dan makro (sosiokultural) untuk membongkar ideologi yang tersembunyi di balik tuturan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasumber, seorang aktivis mahasiswa, menggunakan tujuh taktik kebahasaan meliputi ironi reduktif, metafora, oposisi biner, pelabelan moral ekstrem, diksi resistensi, retorika pemisahan personal-sistemik, dan retorika solidaritas transversal, dengan istilah khas seperti "negara catering" dan "buruh outsourcing". Pada level meso, kanal media independen berperan sebagai katalis distribusi tanpa sensor yang menjangkau lebih dari satu juta penonton dan mendorong reproduksi narasi secara aktif oleh audiens. Pada level makro, narasi perlawanan ini merupakan respons langsung terhadap krisis legitimasi dan represi digital yang sistemik. Penelitian menyimpulkan bahwa ruang publik tandingan digital secara efektif memfasilitasi delegitimasi otoritas moral dan intelektual

rezim, sekaligus membuktikan bahwa perlawanan politik masyarakat sipil telah bergeser kuat ke ruang digital.

Kata-kata kunci: Analisis wacana kritis; narasi perlawanan; delegitimasi rezim; ruang publik tandingan; represi digital.

Pendahuluan

Perguruan tinggi menempatkan mahasiswa sebagai salah satu elemen kelompok intelektual dalam struktur masyarakat demokratis yang menjalankan fungsi partisipasi politik melalui pengawasan terhadap dinamika kebijakan publik (Bunajar & Wardhani, 2025). Fungsi observasi ini bertujuan memberikan perspektif alternatif atas arah pembangunan negara melalui ruang publik yang menjamin kebebasan berpendapat secara setara, sehingga proses evaluasi kebijakan dapat berlangsung terbuka antara warga negara dan pemangku kewenangan (Fatimah, 2025). Praktik penyampaian gagasan semacam ini membutuhkan ruang publik yang menjamin kebebasan berpendapat secara setara, sekaligus memfasilitasi terjadinya proses evaluasi kebijakan secara terbuka antara warga negara dan pemangku kewenangan.

Perhatian publik terhadap isu kesejahteraan kembali menguat pada awal tahun 2026 setelah seorang anak di Nusa Tenggara Timur dilaporkan meninggal dunia akibat keterbatasan ekonomi keluarga yang sangat memprihatinkan (Sahal, 2026). Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai ketepatan sasaran program bantuan pemerintah dan mendorong sejumlah elemen mahasiswa mengevaluasi kembali kebijakan ekonomi pemerintah pusat (Rizkiah et al., 2021). Kasus ini pada akhirnya memunculkan perbandingan antara besarnya pengeluaran anggaran negara dengan kondisi nyata kelaparan yang masih terjadi di lapangan, sebuah kontradiksi yang menjadi pemantik awal bagi lahirnya narasi perlawanan yang dikaji dalam penelitian ini.

Kritik ini disuarakan secara terbuka oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) di bawah kepemimpinan Tiyo Ardianto, yang latar belakang sosiologisnya dekat dengan realitas kelas ekonomi bawah (Amiruddin, 2025). Kritik tersebut secara khusus menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan alokasi dana berskala besar (SINDOnews, 2026) dan dinilai berisiko inefisiensi apabila tidak diimbangi pemerataan akses ekonomi dasar bagi kelompok marginal. Argumentasi berbasis pengalaman akar rumput ini berfungsi sebagai tawaran perspektif baru dalam menilai akuntabilitas program prioritas negara (Syafuruddin et al., 2021). Kritik tersebut berlanjut melalui pengiriman surat terbuka kepada UNICEF Indonesia sebagai upaya memperluas jangkauan suara mahasiswa dan menantang klaim keberhasilan pembangunan pemerintah (Yulianti & Firdaus, 2019).

Alih-alih mendapat ruang dialog, kritik tersebut justru dibalas dengan tindakan pengawasan dan intimidasi fisik berupa penguntitan terhadap Tiyo Ardianto beserta pengurus organisasi kampus (Sudiana & Muhazir, 2021), yang kemudian meluas ke ranah digital melalui pesan ancaman dari nomor luar negeri (Sanjaya et al., 2021) serta penyebaran disinformasi hasil rekayasa visual untuk merusak reputasi personal narasumber (Setyowati et al., 2023). Rangkaian tekanan ini mencerminkan gejala mudurnya kepercayaan publik terhadap pemegang kekuasaan sebagaimana dijelaskan dalam konsep krisis legitimasi, ketika negara kesulitan memenuhi harapan warganya dan merespons kritik dengan cara-cara tertutup, termasuk teror siber, untuk meredam narasi yang meragukan ketepatan sasaran kebijakan (Ekarini et al., 2025).

Dalam situasi tersebut, kanal YouTube Forum Keadilan TV hadir sebagai wadah diskusi mandiri bagi kelompok intelektual yang suaranya dibatasi, dan secara khusus menayangkan episode "Nyala Api di Jalan Sunyi Perjuangan" berdurasi lebih dari empat puluh menit yang menghadirkan Tiyo Ardianto untuk mengartikulasikan pandangan kritisnya secara leluasa. Dialog interaktif di dalam tayangan ini pada akhirnya mengubah ruang internet menjadi sarana penyampaian pendapat berbasis argument (Darmadi et al., 2025).



Sumber: Forum Keadilan Tv (2026)
Gambar 1 Kanal Youtube Forum Keadilan TV

Kelayakan tayangan ini sebagai objek kajian bahasa tampak dari penggunaan kalimat kiasan yang sarat makna perlawanan tersembunyi, misalnya pertanyaan analogis "negara catering" yang secara halus mendelegitimasi program MBG dengan menyiratkan bahwa negara telah mereduksi tanggung jawab konstitusionalnya menjadi sekadar urusan pembagian makanan, maupun pernyataan bahwa penguasa hari ini "sebenarnya hanya buruh outsourcing yang diperintahkan oleh rakyat", yang menegaskan bahwa kewenangan mengatur pemerintahan berasal dari mandat warga negara. Penggunaan struktur bahasa semacam ini menunjukkan adanya strategi sadar dari narasumber untuk meruntuhkan wibawa program pemerintah.

Kompleksitas kiasan tersebut menuntut penelusuran akademis yang presisi, yang dapat dijawab melalui Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough, sebuah pendekatan tiga dimensi yang mampu mengungkap hubungan antara pilihan kata narasumber, proses penyebaran tayangan, dan situasi kepercayaan publik di masyarakat. Pendekatan ini juga membantu mengungkap bagaimana dinamika kepercayaan masyarakat memengaruhi narasi yang terbentuk serta bagaimana posisi sosial tertentu diakui atau diragukan melalui bahasa. Praktik penyampaian pesan melalui kanal digital YouTube telah menjadi fenomena komunikasi politik yang lazim, di mana platform ini menyediakan ruang leluasa bagi pembuat konten baik melalui sinier politik maupun komedi satire untuk mengevaluasi kinerja dan melempar kritik sosial secara terbuka kepada otoritas pemerintah (Pratama et al., 2023).

Meskipun kajian wacana pada media digital telah banyak dilakukan, penelitian yang secara khusus menyoroti irisan antara narasi perlawanan mahasiswa dan tantangan keamanan digital masih terbatas (Sholikhah, 2024), padahal platform YouTube menyediakan ruang luas bagi pembuat konten untuk mengevaluasi kinerja dan melontarkan kritik sosial kepada otoritas pemerintah secara terbuka. Urgensi penelitian ini menjadi semakin relevan karena platform YouTube memiliki jangkauan luas dalam menggambarkan fenomena kebebasan berpendapat yang terjadi dalam masyarakat modern (Utomo & Batanghari, 2024). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana wacana kritis narasi perlawanan dalam delegitimasi rezim dikonstruksi pada episode "Nyala Api di Jalan Sunyi Perjuangan" di kanal YouTube Forum Keadilan TV?

Penelitian ini bertujuan menganalisis narasi perlawanan dalam delegitimasi rezim pada tayangan tersebut melalui dimensi tekstual, praktik diskursif, dan sosiokultural. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian Ilmu Komunikasi, terutama dalam penerapan Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough pada platform media baru, sekaligus memberikan kontribusi pada pengembangan teori komunikasi politik terkait peran media alternatif sebagai sarana evaluasi kebijakan publik. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengelola media digital dalam menyediakan ruang diskusi yang tetap mengedepankan data dan fakta ilmiah, sekaligus memberi gambaran bagi gerakan mahasiswa mengenai pentingnya strategi komunikasi yang terukur dalam menyampaikan aspirasi, serta bermanfaat bagi masyarakat luas untuk meningkatkan literasi dalam mencerna wacana kritis di media sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis yang memosisikan bahasa bukan sekadar alat penyampai pesan, melainkan sarana untuk menunjukkan relasi kekuasaan yang timpang antara pemerintah dan warga negara. Sudut pandang ini memosisikan peneliti sebagai pihak yang bertugas mencari makna tersembunyi di balik susunan kalimat buatan tokoh masyarakat secara teliti, sejalan dengan tujuan analisis wacana untuk membantu suara masyarakat biasa agar lebih didengar (Haryatmoko, 2016).

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam memaknai susunan kata beserta konteks sosial yang melingkupinya. Pendekatan kualitatif dipilih karena lebih mengutamakan penjelasan secara rinci daripada sekadar menghitung angka atau data statistik semata, sehingga memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk menangkap alur percakapan narasumber secara utuh dan alami (Creswell & Poth, 2018).

Metode analisis yang diterapkan adalah Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough, yang membedah wacana ke dalam tiga dimensi berlapis, yaitu analisis teks (mikro), praktik diskursif (meso), dan praktik sosiokultural (makro), sehingga penilaian data tetap terhubung dengan konteks politik yang melingkupinya. Penerapan pisau bedah Fairclough ini memastikan kebenaran hasil bacaan dalam melihat kenyataan di dunia maya secara lebih lengkap (Eriyanto, 2001).

Objek penelitian ini adalah tayangan video "Nyala Api di Jalan Sunyi Perjuangan" yang diunggah pada kanal YouTube Forum Keadilan TV, dengan fokus pengamatan pada struktur percakapan lisan narasumber Tiyo Ardianto beserta tampilan visual di dalam layar. Lokasi penelitian berpusat pada ruang siber melalui platform YouTube sebagai basis observasi utama, sedangkan durasi penelitian disesuaikan dengan pelaksanaan proses analisis teks dan tayangan video. Penelitian tidak melibatkan wawancara tatap muka dengan narasumber; seluruh data bersumber murni dari tayangan video pada episode terpilih tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi digital non partisipan, dokumentasi berupa penangkapan layar visual dan transkripsi ucapan narasumber, serta studi pustaka atas buku dan jurnal akademik yang relevan. Penarikan sampel data menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan dua kriteria. Kriteria pertama mengharuskan peneliti mengambil bagian percakapan yang mengandung pilihan kata, perumpamaan, atau struktur kalimat yang secara sadar digunakan untuk mendelegitimasi kebijakan atau kapasitas moral pemerintah. Kriteria kedua mewajibkan peneliti mengambil bagian dialog yang

menggambarkan pengalaman narasumber dalam menghadapi represi atau pengawasan, baik di dunia nyata maupun ruang siber, yang memengaruhi cara ia menyampaikan wacana perlawanannya. Data yang terkumpul kemudian disusun ke dalam sebuah tabel korpus penelitian yang memuat dua puluh empat penggalan tuturan beserta penanda waktu (timestamp), guna mempermudah proses analisis dan menjaga fokus pembedahan agar selalu sejalan dengan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan secara berjenjang mengikuti tiga dimensi Fairclough. Analisis tekstual (mikro) berfokus pada pilihan kosakata, gaya bahasa, dan taktik pelabelan moral yang digunakan narasumber; peneliti menguliti arti dari pilihan kata bernada sindiran negatif yang ditujukan kepada pembuat kebijakan negara, dengan merujuk pada makna leksikal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk memperkuat validitas pembacaan makna. Analisis praktik diskursif (meso) memetakan proses produksi dan distribusi tayangan oleh redaksi Forum Keadilan TV serta pola konsumsi dan reproduksi wacana oleh audiens, mulai dari kondisi produksi yang lahir di tengah tekanan represi hingga sirkulasi kutipan tajam narasumber di berbagai platform sekunder. Analisis praktik sosiokultural (makro) mengaitkan isi tuturan dengan konteks krisis legitimasi dan represi digital yang melingkupi objek penelitian, sehingga temuan pada ketiga dimensi tersebut secara bersama-sama dapat menjawab rumusan masalah penelitian secara menyeluruh dan tetap berpijak pada realitas politik yang terjadi di lapangan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini merupakan tayangan siniar berdurasi lebih dari empat puluh menit pada kanal YouTube Forum Keadilan TV, yang meneruskan warisan jurnalisme dari jenama media FORUM KEADILAN yang telah eksis sejak era 1990-an dengan tagline "Konstruktif, Informatif dan Edukatif". Independensi editorial kanal ini memungkinkan penyajian diskursus kritis tanpa proses penyaringan atau sensor, sehingga menjadikannya ruang publik tandingan yang efektif bagi kelompok yang narasinya sering disingkirkan oleh media arus utama. Posisi independen dari cengkeraman media arus utama ini menjadikan Forum Keadilan TV berfungsi secara efektif sebagai wadah yang menampung luapan kekecewaan dan evaluasi dari publik ketika saluran komunikasi formal milik institusi negara mengalami kebuntuan.

Tiyo Ardianto, yang pada saat tayangan dipublikasikan menjabat sebagai Ketua BEM UGM, merupakan aktor sosial utama dalam produksi wacana perlawanan ini. Posisinya sebagai tokoh pergerakan kampus memberikan otoritas moral untuk mengevaluasi kinerja

pemerintah, sehingga setiap tuturannya dibaca bukan sebagai keluhan pribadi, melainkan gugatan kolektif kaum intelektual muda. Latar belakang sosiologisnya yang dekat dengan realitas kelas ekonomi bawah, yang tervalidasi oleh jejak pendidikannya sebagai lulusan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau Kejar Paket C sebelum menembus ruang akademis di universitas terkemuka, turut memberikan resonansi emosional yang autentik ketika ia mengkritik alokasi anggaran negara yang dinilai mengabaikan kesejahteraan dasar warganya. Modal sosial dan rekam jejak perjuangan inilah yang menjadikan argumentasinya membumi, tajam, dan berhasil mewakili suara rakyat kecil yang merasa terpinggirkan dari arah kebijakan pembangunan negara.



Sumber: Forum Keadilan Tv (2026)

Gambar 2 Thumbnail Episode "Nyala Api di Jalan Sunyi Perjuangan"

Wacana kritis yang terekam dalam tayangan ini lahir dari rentetan peristiwa yang saling berkaitan erat di ruang publik, bermula ketika institusi negara mendapat sorotan tajam terkait alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis yang menelan dana hingga ratusan triliun rupiah, bersamaan dengan realitas ironis mengenai kasus seorang anak di Nusa Tenggara Timur yang mengakhiri hidupnya akibat keterbatasan ekonomi keluarga. Alih-alih mendapatkan ruang dialog atau klarifikasi kebijakan yang terbuka, respons yang muncul justru bermanifestasi dalam bentuk tekanan fisik dan psikologis yang meluas ke ranah siber. Fenomena ini sejalan dengan temuan (Septia, 2025) yang menegaskan bahwa ruang digital pada era kiwari tidak hanya memperluas partisipasi gerakan mahasiswa, tetapi juga memunculkan represi dan disinformasi yang secara nyata mengancam kebebasan sipil.

Pemilihan judul "Nyala Api di Jalan Sunyi Perjuangan" merupakan keputusan redaksional yang secara sadar dirancang untuk membangun bingkai psikologis tertentu di benak penonton. Kata "nyala api" menyimbolkan konsistensi keberanian yang terus menyala, sementara frasa "jalan sunyi" menggambarkan realitas pahit bahwa perjuangan menyuarakan kebenaran sering sepi dari dukungan dan penuh teror, sehingga penonton diarahkan untuk melihat narasumber bukan sebagai pelaku kegaduhan, melainkan sebagai penyintas represi yang layak mendapat empati dan solidaritas. Pilihan format sinjar berdurasi panjang ini pun

memegang peranan krusial dalam pembentukan struktur wacana secara komprehensif, memberikan ruang eksklusif bagi narasumber untuk merangkai argumen secara utuh, logis, dan mendetail tanpa pemotongan adegan, berbeda dari program berita televisi konvensional yang membatasi durasi bicara narasumber demi mengejar waktu tayang komersial.

Dimensi Tekstual (Mikro)

Kerangka Fairclough menempatkan teks bukan sekadar medium penyampai pesan yang netral, melainkan ruang operasi ideologi tempat kekuasaan direproduksi sekaligus medan perlawanan. Pembacaan cermat terhadap tuturan Tiyo Ardianto mengidentifikasi tujuh taktik kebahasaan utama yang digunakan secara sengaja untuk membongkar kepalsuan narasi kesejahteraan pemerintah, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1 Taktik Kebahasaan dalam Narasi Perlawanan

Taktik Kebahasaan	Contoh Unit Analisis	Makna dan Tujuan Tersembunyi
Diksi Sindiran, Ironi, dan Paradoks	"negara catering"; "proyek yang jahat"; Rp10.000 vs Rp335 triliun	Merendahkan fungsi konstitusional negara menjadi sekadar penyedia logistik; menelanjangi kesalahan prioritas anggaran.
Metafora untuk Mendelegitimasi Kekuasaan	"buruh outsourcing"; "paracetamol"; "terbunuh oleh sistem"; "sistem destilasi"	Membalik hierarki kekuasaan; memindahkan tanggung jawab moral ke negara; menuntut standar kognitif lebih tinggi dari penguasa.
Oposisi Biner dan Framing Kepentingan	"pemerintahan yang bodoh" vs "rakyat pintar"; reframing "stunting" menjadi "proyek 2029"	Membingkai ulang kebijakan sebagai alat kepentingan elektoral; mengeskalasi kritik menjadi tuduhan pelanggaran konstitusi.
Pelabelan Moral Ekstrem (Moral Labeling)	"rezim yang bodoh dan inkompeten"; idiom "shummun bukmun umyun"	Mencabut kewibawaan teknis dan moral-spiritual pemerintah tanpa balutan eufemisme.
Diksi Resistensi dan Konstruksi Ancaman Kolektif	"rakyat hanya sedang menunggu..."	Membalikkan posisi ancaman dari aktivis kepada penguasa; melegitimasi kemarahan kolektif rakyat.
Retorika Pemisahan Personal-Sistemik	"tidak ada yang membenci Bapak, kita hanya membenci imajinasi..."	Memisahkan kritik kebijakan dari serangan personal; merebut kendali narasi dari tuduhan balik.
Retorika Solidaritas Transversal dan Autokritik Reflektif	ekspresi solidaritas lintas kelompok dan refleksi diri narasumber	Membangun kredibilitas etis (ethos) di tengah upaya delegitimasi personal terhadap narasumber.

Ketujuh taktik tersebut saling menguatkan dalam membangun argumentasi yang runtut. Ironi reduktif pada penyebutan "negara catering" secara sengaja membenturkan makna leksikal "negara" sebagai pelindung rakyat dengan "katering" sebagai usaha transaksional semata, sehingga meruntuhkan keagungan fungsi konstitusional pemerintah. Metafora "buruh outsourcing" pada tuturan penutup tayangan bekerja dengan logika serupa: dengan menempelkan label pekerja kontrak kepada presiden dan jajaran menteri, narasumber membalikkan total hierarki kekuasaan yang selama ini tertanam di benak masyarakat dan menegaskan bahwa kewenangan mengatur negara sesungguhnya berasal dari mandat rakyat. Taktik oposisi biner dan pelabelan moral ekstrem bekerja pada level yang lebih tajam dengan menghilangkan bahasa penghalus (eufemisme) sepenuhnya, sehingga kritik terhadap kebijakan bergeser menjadi vonis langsung terhadap kapasitas dan etika penyelenggara negara.

Penggunaan Diksi Sindiran, Ironi, dan Paradoks

Mengacu pada kajian tentang teori utilitarianisme Jeremy Bentham, keberhasilan sebuah kebijakan seharusnya dievaluasi dari keseimbangan manfaat (pleasure) dan penderitaan (pain) di masyarakat, bukan sekadar ketetapan sepihak penguasa. Ketika kebijakan justru mendatangkan lebih banyak penderitaan dan saluran keluhan formal menjadi buntu, masyarakat sipil akan mengambil peran sentral untuk menuntut keadilan, sebagaimana ditegaskan dalam riset mengenai ketahanan demokrasi bahwa penolakan tajam dari masyarakat luas berfungsi sebagai akuntabilitas vertikal untuk mencegah kemunduran demokrasi (Pratiwi et al., 2022).

Pada tuturan "Loh, ini negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara catering Republik Indonesia?", narasumber sedang merendahkan derajat pemerintah secara sengaja dari pelindung rakyat menjadi sekadar penjual makanan. Kajian mengenai retorika kuasa dan resistensi digital mencatat bahwa ujaran pejabat yang nir-empati sering kali membentangkan jurang pemisah antara kekuasaan dan rakyat, dan sebagai respons atas krisis etik tersebut, masyarakat melahirkan satire dan ironi digital sebagai bentuk pertentangan epistemik untuk menunjukkan bahwa narasi kekuasaan tidaklah mutlak (Yudha & Yogantari, 2026). Pada tuturan berikutnya, narasumber memutarbalikkan makna kata "program" dan "proyek": kajian aktivisme digital kebijakan menjelaskan bahwa ketidaksesuaian substansi kebijakan dengan nilai masyarakat merupakan fase pemicu yang ampuh untuk menggerakkan opini publik dan aksi langsung di media digital (Zulfa Annisa Rahmadhani & Kusumasari, 2023).

Ketajaman kritik ini mencapai puncaknya ketika narasumber sengaja membandingkan dua angka yang sangat jomplang dalam satu kalimat tunggal: uang Rp10.000 yang menyebabkan kematian seorang anak, dibenturkan dengan dana raksasa 335 triliun untuk program pemerintah. Studi mengenai Analisis Wacana Kritis pada media digital menegaskan bahwa praktik diskursif dan pilihan bahasa selalu merepresentasikan relasi kekuasaan serta ketimpangan kelas sosial (Sihombing et al., 2026). Narasumber juga memunculkan istilah "ahli serangga" untuk menyentil rasionalitas penempatan jabatan birokrasi Badan Gizi Nasional; riset mengenai ketahanan demokrasi di Indonesia mencatat bahwa kritik tajam terhadap anomali birokrasi merupakan bentuk akuntabilitas vertikal yang esensial (Firmansyah, 2024). Pada penutup taktik ini, kuantifikasi kalkulasi bisnis mengenai laba SPPG mengubah tuduhan abstrak tentang kepentingan pemilu menjadi model ekonomi-politik yang dapat dihitung langsung oleh masyarakat, sejalan dengan catatan bahwa ruang media digital telah bertransformasi menjadi arena baru bagi masyarakat untuk menelanjangi bahasa politik elite (Yudha & Yogantari, 2026)

Penggunaan Metafora untuk Mendelegitimasi Kekuasaan

Penggunaan metafora dalam wacana politik masyarakat sipil bukanlah sekadar variasi gaya bahasa untuk memperindah kalimat, melainkan strategi diskursif yang terencana untuk meruntuhkan hierarki kekuasaan. Kajian mengenai penggunaan bahasa metaforik di media sosial membuktikan bahwa kiasan berfungsi sebagai instrumen utama untuk mendelegitimasi otoritas dan membongkar kepalsuan niat institusi penguasa yang mengekang kebebasan warganya (Vogiatzis, 2025).

Pada tuturan "Saya harap penguasa hari ini punya kesadaran bahwa mereka ini sebenarnya hanya buruh outsourcing yang diperintahkan oleh rakyat", narasumber membalikkan total hierarki kekuasaan yang selama ini tertanam di masyarakat, sehingga pejabat negara secara diskursif dilucuti otoritas mutlaknya dan ditempatkan sekadar sebagai pekerja kontrak sementara. Analisis wacana protes digital pada gerakan pemuda menunjukkan bahwa penciptaan polaritas bahasa semacam ini sukses memberikan agensi kepada warga sipil untuk mengoreksi tindakan elite politik yang dianggap gagal (Omoke, 2026). Pada metafora medis "pertemuan dengan pejabat itu hanya paracetamol yang meredakan nyeri bangsa", narasumber secara ideologis menuduh bahwa negara sengaja merancang ritual dialog semata-mata sebagai alat membius kesadaran kritis masyarakat tanpa memberikan solusi riil, sejalan dengan riset mengenai dinamika partisipasi publik yang menegaskan bahwa pelibatan

masyarakat oleh negara sering kali belum mencapai taraf bermakna dan sekadar menjadi formalitas prosedural belaka (Hermanto et al., 2023).

Pergeseran struktur kalimat dari "bunuh diri" menjadi "terbunuh oleh sistem" secara cerdas memindahkan beban tanggung jawab moral dari ranah nasib personal ke ranah kegagalan sistem bernegara; kajian mengenai analisis transitivitas membuktikan bahwa proses material dan pilihan kata kerja sangat sarat akan ideologi untuk mengonstruksi pihak mana yang bersalah dan melegitimasi korban di mata publik (Kurniawati, 2022). Sementara itu, metafora "sistem destilasi" menuntut standar kapasitas kognitif dan emosional yang tinggi dari penyelenggara pemerintahan, membalikkan beban tuntutan secara drastis; studi tentang kontestasi wacana kebijakan membenarkan bahwa ruang deliberatif sering kali dibatasi oleh narasi dominan elite, sehingga masyarakat sipil harus mengartikulasikan narasi tandingan untuk mendobrak eksklusi simbolik tersebut (Siregar et al., 2026).

Struktur Oposisi Biner dan Framing Kepentingan

Taktik komunikasi politik tidak selalu bergantung pada bahasa yang halus, melainkan sering kali memanfaatkan struktur oposisi biner untuk memaksa publik menentukan keberpihakan. Pada tuturan "pemerintahan yang bodoh takut kalau rakyatnya pintar", oposisi biner ini menanamkan gagasan bahwa ketiadaan pendidikan gratis dibingkai sebagai pilihan sadar dari penguasa agar warganya tetap mudah dikendalikan, sejalan dengan kajian AWK terkait wacana isu pendidikan yang menegaskan bahwa bahasa kritis digunakan untuk membongkar hegemoni penguasa yang kerap meminggirkan hak dasar warga (Syafuruddin et al., 2021).

Pembingkai ulang program pencegahan stunting menjadi "proyek supaya Presiden Prabowo bisa terpilih lagi di 2029" menelanjangi niat kekuasaan di balik program Makan Bergizi Gratis; kajian AWK kebijakan publik menunjukkan bahwa wacana oposisi kerap membongkar rasionalitas semu pemerintah yang berlandung di balik program-program populis (Erawati et al., 2022). Benturan antara nominal anggaran dan frasa "melanggar konstitusi" mengeskalasi perdebatan dari sekadar kritik teknis pembagian anggaran menjadi tuduhan kejahatan tata negara, sejalan dengan temuan bahwa ketika sebuah kebijakan dinilai secara diskursif melanggar aturan dasar, maka legitimasi hukum dan moral pemerintah akan seketika runtuh di mata publik (Ekarini et al., 2025).

Oposisi antara "joget dan gimik" dengan "rakyat justru tertipu" mendekonstruksi kemenangan penguasa dengan membingkainya sekadar sebagai hasil dari tontonan layar kaca; kajian AWK tentang wacana entertainment politik menemukan bahwa gaya komunikasi yang

mengandalkan gimik semata merupakan bentuk pembodohan publik yang mendegradasi substansi demokrasi (Suryawati, 2021). Perluasan oposisi biner pada tuturan "Perdana Ari hanya membakar tenda... tapi mereka membakar kepercayaan rakyat" menggeser secara paksa subjek yang dituduh sebagai pihak "merugikan negara" kembali ke pangkuan aparat keamanan, sebagaimana ditegaskan (Pratama, A. & Swarizona, 2022) bahwa wacana perlawanan kerap digunakan untuk menelanjangi represi penguasa yang berlindung di balik dalih ketertiban umum. Sementara itu, kiasan "gunung es" pada kritik terhadap forum mahasiswa yang justru didominasi pejabat menjustifikasi keputusan BEM UGM keluar dari aliansi arus utama, sejalan dengan penjelasan (Rizkiah et al., 2021) bahwa wacana gerakan aliansi mahasiswa sering kali dihadapkan pada ancaman kooptasi oleh kepentingan elite yang berusaha mengebiri daya kritis mereka.

Pelabelan Moral Ekstrem (Moral Labeling)

Kebuntuan saluran komunikasi formal sering kali memaksa masyarakat sipil untuk meninggalkan kesantunan diplomatik dalam berpendapat. Pada tuturan "rezim Prabowo-Gibran itu harus kita akui sebagai rezim yang bodoh... rezim yang inkompeten", penyebutan nama institusi secara gamblang tanpa balutan eufemisme merupakan wujud nyata evaluasi kinerja pejabat sekaligus pendidikan politik bagi publik, sebagaimana dikonfirmasi oleh (Putri & Subadri, 2021) dalam kajiannya mengenai kritik terbuka di platform YouTube. Serangan diskursif ditingkatkan secara ekstrem melalui idiom religius "shummun bukmun umyun" yang menyamakan penguasa dengan golongan yang menolak peringatan kemanusiaan; (Sholikhah, 2024) menegaskan bahwa narasi perlawanan kelompok kritis di media alternatif sering kali memanfaatkan instrumen nilai dan moral untuk mendelegitimasi otoritas yang dianggap telah menyimpang dari mandat.

Diksi Resistensi dan Konstruksi Ancaman Kolektif

Ancaman digital yang diterima narasumber, mulai dari penguntitan fisik hingga teror psikologis, dirancang untuk menciptakan efek bungkam (*chilling effect*) agar aktivis menarik diri dari ruang publik. Namun, narasumber justru membalas tekanan tersebut dengan diksi resistensi yang mempertegas posisinya sebagai subjek yang tidak bisa ditundukkan. Pada deklarasi defensif yang mengutip filsafat Nietzsche, "silakan teror saya sebesar apapun...", narasumber memosisikan dirinya sebagai subjek yang tidak bisa dilemahkan oleh intimidasi apa pun, sejalan dengan konsep connective action dalam aktivisme digital di mana partisipasi politik dilakukan melalui pengorganisasian diri dan narasi individu yang berani menantang struktur otoriter.

Hiperbola "penguasa tidak pernah tidur selamanya karena menerima anxiety luar biasa" memproyeksikan teror psikologis kepada penguasa sebagai bom waktu yang pasti meledak; penelitian mengenai fenomena gerakan populisme dalam kemunduran demokrasi menegaskan bahwa populisme dapat menjadi gerakan kontra-demokrasi ketika kebijakan yang lahir bersifat diskriminatif, sehingga ancaman kolektif rakyat menjadi respons yang sah atas kebijakan tersebut. Pengakuan psikologis narasumber yang "merasa terawasi" menjadi bukti linguistik nyata bahwa ia sadar berada dalam radar pemantauan aparat negara, sejalan dengan penegasan bahwa keterlibatan pasukan siber dan peretasan telah menjadi karakter baru dalam proses pembentukan kebijakan yang represif di Indonesia (Wiratraman, 2023). Deklarasi performatif "kita bikin teror itu gagal" menetralkan ketakutan melalui pengucapan itu sendiri, sekaligus menegaskan posisi moral narasumber sebagai pihak yang kebal terhadap intimidasi siber.

Retorika Pemisahan Personal-Sistemik dan Pembalikan Tuduhan

Taktik ini muncul dari kebutuhan retorik narasumber untuk menyampaikan delegitimasi yang tajam tanpa terjebak pada serangan personal yang bisa dibalas melalui jerat hukum, sebuah pola stigmatisasi yang lazim diarahkan kepada aktivis pembela kebijakan publik (Sanjaya et al., 2021). Pada tuturan "Pak Prabowo, sebenarnya tidak ada yang membenci Bapak. Kita hanya membenci imajinasi...", objek kebencian digeser dari sosok personal kepada "imajinasi" abstrak, sebuah pergeseran yang melindungi narasumber dari tuduhan serangan personal yang bisa dipidana, meski di baliknya tersisip tuduhan inkompetensi kognitif secara halus. Pola ini merupakan bentuk kesantunan negatif yang berfungsi ofensif, sebagaimana dibahas dalam studi populisme bahwa gerakan populis kerap menyerang legitimasi elite dengan membedakan antara "pemimpin yang tidak sadar" dan "kerusakan sistemik" yang diakibatkannya (Hilmy, 2020).

Pembalikan tuduhan pada data "kalau kami itu disebut antek asing, tapi kok ternyata yang meneror kami juga nomornya nomor asing" bekerja melalui logika *argumentum ad reductio*, menunjukkan bahwa premis penuduh justru berlaku lebih kuat pada pihak penuduh itu sendiri. Taktik ini merebut kembali kendali atas kategori tuduhan dan mengarahkannya balik kepada pihak yang memproduksi represi, sejalan dengan temuan bahwa politik kekuasaan sering kali terlibat atau membiarkan situasi serangan digital sebagai instrumen untuk melumpuhkan lawan politik (Wiratraman, 2023).

Retorika Solidaritas Transversal dan Autokritik Reflektif

Taktik ketujuh ini menyingkap dimensi wacana perlawanan yang jarang ditemukan dalam kritik populer, yakni perluasan solidaritas kepada aktor lain serta kesediaan mengarahkan kritik kepada kelompok sendiri. Pembelaan terhadap aktivis lain yang tidak hadir dalam tuturan, seperti buruh Semarang dan mahasiswa BEM UNY, memperluas subjek pembelaan dari kepentingan personal menjadi solidaritas struktural lintas kelompok, mengubah posisi narasumber dari "korban yang membela diri" menjadi "juru bicara bagi kelompok tertindas yang lebih luas". Sejalan dengan temuan (Wiratraman, 2023), aksi solidaritas terhadap aktivis yang dikriminalisasi merupakan bentuk perlawanan terhadap sistem hukum yang represif.

Autokritik terhadap gerakan mahasiswa sendiri, "kita semua saya rasa kalau mahasiswa ada yang menonton ini harus melakukan autokritik ke diri sendiri... hyper ekstra, super ultra individualism di kalangan mahasiswa", merupakan langkah berisiko yang menantang kesepakatan internal, namun justru di situlah letak kekuatan persuasi narasumber, karena audiens cenderung menilai penutur yang bersikap jujur dan mampu mengakui kelemahan kelompoknya sebagai pihak yang lebih objektif dan layak dipercaya. Penelitian mengenai fenomena gerakan populisme dalam kemunduran demokrasi menunjukkan bahwa kemampuan gerakan untuk merefleksikan diri secara kritis merupakan salah satu indikator ketangguhan organisasi di tengah gempuran kepentingan luar (Hilmy, 2020).

Secara keseluruhan, taktik oposisi biner dan pelabelan moral ekstrem bekerja pada level yang lebih tajam dengan menghilangkan bahasa penghalus sepenuhnya, sementara retorika pemisahan personal-sistemik dan solidaritas transversal menunjukkan kematangan strategi komunikasi narasumber, yakni kemampuan menyerang substansi kebijakan tanpa terjebak pada serangan personal yang berisiko hukum, sekaligus membangun kredibilitas etis di hadapan publik. Kepadatan taktik kebahasaan ini membuktikan bahwa setiap diksi yang dilontarkan narasumber merupakan keputusan linguistik dengan konsekuensi ideologis yang dirancang untuk melucuti otoritas moral dan intelektual rezim.

Dimensi Praktik Diskursif (Meso)

Pada dimensi praktik diskursif, tayangan "Nyala Api di Jalan Sunyi Perjuangan" tidak dapat dilepaskan dari kondisi produksi yang penuh tekanan. Proses produksi teks lahir dari rangkaian represi nyata yang dialami narasumber, mulai dari kebuntuan kritik terhadap kebijakan MBG hingga rentetan ancaman siber dan penguntitan fisik, sehingga narasumber kehilangan insentif untuk menjaga bahasa penghalus dan memilih pelabelan moral yang

ekstrem. Produksi wacana ini juga mendapat topangan dari jaringan institusional tandingan berupa koordinasi dengan satuan keamanan kampus dan lembaga perlindungan saksi, sebuah bantalan keamanan yang memungkinkan taktik kebahasaan sefrontal itu berani diucapkan mengingat risiko personalnya yang sangat besar.

Pada tahap pengemasan dan distribusi, keputusan editorial kanal Forum Keadilan TV untuk menayangkan wawancara berdurasi panjang tanpa sensor merupakan manuver institusional yang krusial. Kajian terdahulu membuktikan bahwa podcast telah menjadi arena baru komunikasi politik di Indonesia tempat diskursus diurai lebih mendalam (Panuju, 2023). Format siniar memungkinkan ketujuh taktik kebahasaan pada dimensi mikro tampil utuh tanpa terpotong menjadi kutipan pendek, berbeda dengan program berita televisi konvensional yang membatasi durasi bicara narasumber. Tayangan yang mencapai lebih dari satu juta penonton ini turut dibantu oleh algoritma platform yang merekomendasikannya kepada audiens dengan riwayat konsumsi konten politik yang searah; penelitian dinamika media digital menunjukkan algoritma memainkan peran besar dalam mendistribusikan wacana oposisi melampaui gelembung komunitas aktivis (Amri & Yandri, 2025) sehingga kutipan-kutipan tajam seperti "negara catering" beredar lepas dari konteks aslinya melalui distribusi sekunder di berbagai platform media sosial.

Pada tahap konsumsi, audiens terbukti bukan penerima pasif, melainkan aktor yang ikut menafsirkan dan mengaktifkan kembali wacana perlawanan tersebut. Kolom komentar tayangan menjadi ruang nyata tempat audiens memperkuat wacana narasumber, sementara kutipan kunci dari tayangan kerap direproduksi ulang menjadi teks pada gambar atau komentar pada peristiwa politik lain, sehingga wacana perlawanan ini terus bersirkulasi dan membesar di ruang publik digital; wacana tandingan pun berhasil merebut dominasi narasi di ruang maya sekaligus menekan narasi resmi pemerintah (Noordenbos & Tuters, 2026). Kekuatan persuasi tayangan ini juga ditopang oleh interdiskursivitas yang memadukan sekurangnya lima orde wacana berbeda yakni hukum, ekonomi, religius, filsafat, dan medis yang memperluas basis penerimaan argumen narasumber kepada audiens dari berbagai latar belakang rasionalitas. Penonton yang menganut rasionalitas hukum kemungkinan besar tergerak oleh penjabaran mengenai kewajiban konstitusi kenegaraan, sementara penonton yang skeptis terhadap teori akademik bisa jadi justru tersentuh oleh pendekatan narasi atau idiom keagamaan, sehingga penggabungan ragam gaya bahasa ini bertindak sebagai strategi diskursif cerdas untuk memaksimalkan resonansi wacana perlawanan lintas segmen audiens.

Dimensi Sosiokultural (Makro)

Pada dimensi sosiokultural, wacana perlawanan dalam tayangan ini dibaca sebagai respons langsung terhadap krisis legitimasi yang melanda hubungan antara negara dan warganya. Kebuntuan advokasi kelembagaan mahasiswa yang tidak mendapat tanggapan serius dari pembuat kebijakan menjadikan kanal media independen sebagai katup pelepas tekanan di tengah ruang demokrasi yang menyempit, sekaligus saluran artikulasi bagi kemarahan publik yang terakumulasi terhadap institusi pemerintahan.

Represi digital menjadi konteks produksi wacana yang tidak terpisahkan dari tayangan ini. Tiyo Ardianto menghadapi setidaknya lima modus ancaman sistematis sebelum tampil di tayangan tersebut. Modus pertama melibatkan pesan intimidasi anonim menggunakan nomor ponsel luar negeri yang bertujuan menyembunyikan jejak pelaku. Modus kedua berpusat pada penyebaran tuduhan penggelapan uang organisasi yang dikirimkan langsung kepada pihak keluarga, sebuah serangan psikologis yang berusaha menghancurkan kredibilitas moral organisasi secara kolektif di mata masyarakat terdekat. Modus ketiga berupa peringatan operasi intelijen yang menargetkan nyawa pimpinan lembaga. Modus keempat menampilkan kampanye pembunuhan karakter secara masif menggunakan gambar rekayasa kecerdasan buatan terkait isu pelanggaran asusila, di mana kemajuan teknologi dimanfaatkan secara tidak bermoral untuk merusak reputasi aktivis melalui manipulasi visual yang sangat sulit diklarifikasi. Modus kelima melibatkan praktik penguntitan fisik secara langsung di wilayah permukiman kampung halaman narasumber. Kajian perlindungan warga sipil menunjukkan bahwa aktivisme digital kerap memicu respons keras berupa kriminalisasi kebebasan berpendapat (Rajasa & Ramadhan, 2024).

Rentetan serangan personal tersebut bertujuan mengalihkan perhatian publik dari substansi kritik kebijakan menuju kelemahan individu, dengan harapan menciptakan efek bungkam kolektif agar individu lain yang menyaksikan teror tersebut memilih diam demi keselamatan diri. Alih-alih membungkam, rangkaian represi tersebut justru menjadi bahan bakar yang memperkuat radikalitas bahasa narasumber, sementara pengakuannya secara terbuka di hadapan kamera mengenai perasaan terawasi menjadi bentuk perlawanan yang mematahkan skenario ketakutan yang dirancang pihak peneror.

Kelompok kritis terpaksa mencari arena independen untuk berpendapat saat saluran audiensi formal sengaja ditutup. Kanal media massa daring hadir mengisi kekosongan tersebut dan berfungsi sebagai ruang publik tandingan bagi perdebatan rasional; kehadiran media sosial memberikan fleksibilitas tinggi bagi gerakan kaum muda memotong birokrasi penyiaran

konvensional (Sufri Eka Bhakti, 2020). Keputusan organisasi mahasiswa keluar dari aliansi arus utama turut memperkuat komitmen penjagaan independensi dari kooptasi elite politik, membuktikan bahwa perjuangan aktivisme tidak sekadar memproduksi narasi perlawanan semata, tetapi juga diwujudkan lewat upaya menjaga kemurnian ruang diskusi agar tidak terkontaminasi intervensi penguasa.

Keseluruhan struktur wacana narasumber juga berakar pada kecenderungan pemikiran populis yang beraliran anti-elite, secara konsisten membelah masyarakat ke dalam dua kubu antagonis berupa rakyat murni melawan figur pejabat yang dianggap korup; kasus wawancara ini memiliki keunikan karena meminjam retorika populis murni untuk membangun otoritas moral pergerakan (Imron et al., 2021). Namun demikian, bahasa populis ini tidak digunakan untuk menarik simpati elektoral demi memenangkan kontestasi pemilihan umum, melainkan untuk menelanjangi kepalsuan argumen penguasa di hadapan rasionalitas penonton digital. Temuan ini menegaskan bahwa posisi historis gerakan mahasiswa sebagai agen pengontrol kebijakan tetap konsisten menghadapi perubahan zaman, dengan medium pergerakan yang kini bergeser lebih terpusat ke arena digital yang menawarkan jangkauan penyebaran ideologi jauh lebih luas. Autokritik narasumber terhadap sikap pragmatis yang mulai menjangkiti sebagian besar kelompok pergerakan kaum intelektual turut menepis tuduhan bahwa partisipasi mahasiswa di internet sering diremehkan sekadar aksi klik tanpa makna, sekaligus membuktikan bahwa elemen masyarakat sipil tetap memiliki daya hantam nyata untuk melucuti keabsahan rezim otoriter.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tayangan sinier "Nyala Api di Jalan Sunyi Perjuangan" pada kanal YouTube Forum Keadilan TV bukan sekadar medium penyampaian kritik mahasiswa, melainkan instrumen perlawanan ideologis yang dikonstruksi secara sistematis untuk meruntuhkan keabsahan moral dan rasionalitas rezim yang berkuasa. Strategi delegitimasi ini beroperasi secara simultan melalui tiga dimensi Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough yang saling mengunci satu sama lain.

Pada dimensi tekstual, narasumber menggunakan tujuh taktik kebahasaan ekstrem seperti ironi reduktif, metafora, oposisi biner, pelabelan moral ekstrem, diksi resistensi, retorika pemisahan personal-sistemik, dan retorika solidaritas transversal yang secara langsung melucuti kewibawaan pejabat negara tanpa terjebak pada batasan kesantunan formal. Pada dimensi praktik diskursif, ekosistem media alternatif memegang peran penting dalam memfasilitasi lahirnya wacana radikal ini, mulai dari kondisi produksi yang lahir di tengah

tekanan represi, keputusan editorial menayangkan wawancara tanpa sensor, hingga distribusi digital yang memicu konsumsi audiens yang sangat aktif mereproduksi kutipan tajam narasumber. Pada dimensi sosiokultural, wacana perlawanan ini merupakan respons langsung terhadap krisis legitimasi dan ancaman otoritarianisme digital di Indonesia, di mana represi berupa ancaman siber dan pembunuhan karakter justru bertindak sebagai bahan bakar yang memperkuat radikalitas artikulasi narasumber.

Temuan ini memperkaya kajian Ilmu Komunikasi mengenai penerapan Analisis Wacana Kritis pada platform media baru dan memberi kontribusi bagi pengembangan teori komunikasi politik terkait peran media alternatif sebagai sarana evaluasi kebijakan publik. Penelitian ini juga membatasi fokus analisis pada satu tayangan sinier spesifik menggunakan kerangka Norman Fairclough, sehingga peneliti selanjutnya dalam lingkup kajian Ilmu Komunikasi sangat dianjurkan memperluas cakupan analisis wacana kritis terhadap ragam bentuk represi digital pada platform lain, misalnya dengan mengombinasikan Analisis Wacana Kritis dan analisis jaringan sosial (*Social Network Analysis*) untuk memetakan pola sirkulasi wacana tandingan di era algoritma. Pendekatan lintas disiplin semacam ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai aktor-aktor yang mendistribusikan wacana perlawanan di ruang publik digital.

Secara praktis, gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa perlu terus memperkuat infrastruktur keamanan digital guna menghadapi ancaman represi otoritarianisme masa kini. Pemeliharaan ruang publik tandingan seperti kanal media massa independen sangat krusial untuk memastikan wacana perlawanan tetap memiliki medium artikulasi yang terbebas dari kooptasi kekuasaan. Sementara itu, pemerintah dan aparat negara disarankan menghentikan pendekatan represif dan kriminalisasi terhadap suara kritis warga negara, serta menjadikan kritik substantif publik sebagai materi evaluasi penyelenggaraan negara ketimbang melihatnya sebagai ancaman yang harus dibungkam melalui teror siber.

Daftar Pustaka

- Amiruddin. (2025). Environmental Justice and Islamic Ethics: A Conversation with Anna M. Gade. *Maarif*, 19(1), 47–62. <https://doi.org/10.47651/mrf.v19i2.258>
- Amri, Y., & Yandri, L. I. (2025). *Algoritma Media Sosial Dan Polarisasi Politik Dalam Demokrasi Digital Di Indonesia*. 4(1), 78–84.
- Bunajar, H., & Wardhani, N. W. (2025). Gerakan Mahasiswa Dalam Bentuk Demonstrasi Sebagai. *Ganesha Civic Educational Journal*, 5(1), 52–56.
- Darmadi, Sonni, A. F., Ismail, A., & Wahyuddin. (2025). Analisis Netnografi atas Diskursus Publik Terkait Skandal Mahkamah Konstitusi dalam Video ‘ Bocor Alus Politik ’ di YouTube Pendahuluan Isu tentang independensi dan integritas lembaga peradilan ,

- terutama Mahkamah Konstitusi (MK), telah menjadi sorotan. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 11(1), 100–119. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v11i1.37515>
- Ekarini, D., Dewi, I., Yusuf, M., & Prayuti, Y. (2025). Legitimasi Hukum Omnibus Law dalam Perspektif Habermas dan Teori Hukum Kritis. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(6), 4885–4892.
- Erawati, A., Suri Muhammad, & Dalimunthe, S. (2022). Nourman Fairclough's Critical Discourse Analysis of Jokowi Who Flicked His Minister Regarding the Increase in Cooking Oil Prices. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 10653–10662.
- Fatimah, S. (2025). Volume 19 Nomor 1 Juni 2025 Transformasi Ruang Publik Digital : Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 19(1), 67–86.
- Firmansyah, L. (2024). Tangguh di Tengah Arus Regresi: Ketahanan Demokrasi dan Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden Era Jokowi. *Indonesian Journal of Political Studies (IJPS)*, 4(1), 11–39. <https://doi.org/10.15642/ijps.2024.4.1.11-39>
- Hermanto, B., Hukum, F., & Udayana, U. (2023). DINAMIKA PARTISIPASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN LEGISLASI YANG PARTISIPATORIS. *Jurnal Yudisial*, 16(2), 205–231. <https://doi.org/10.29123/jy/v16i2.668>
- Hilmy, M. I. (2020). Fenomena Gerakan Populisme. *Civic Hukum*, 5(2), 146.
- Imron, I., Yuliana, S., Dewi, V., & Rindiani, A. (2021). Penguatan Demokrasi Dalam Politik Identitas dan Populisme di Indonesia. *Respons Akademisi Terhadap Isu Kenegaraan Dan Kemasyarakatan Masa Kini: Perspektif Psikologi Dan Sosiologi*, 1(1), 239–250.
- Kurniawati, Y. (2022). Keberpihakan Media Berita Lokal Papua Dan Nasional Terkait Peristiwa Kekerasan Kiwirok 13 September 2021: Analisis Transitivity. *Metahumaniora*, 12(3), 280–286. <https://doi.org/10.24198/metahumaniora.v12i3.40013>
- Noordenbos, B., & Tuters, M. (2026). *The counter-hegemonic hegemon : A cross-platform analysis of a Kremlin-backed strategic narrative*. <https://doi.org/10.1177/29768624251411006>
- Omoke, L. K. (2026). The discursive construction of youth and government in Kenya's 2024 Finance Bill digital protests. *Research Journal in Advanced Humanities*, 7(2), 1–18. <https://doi.org/10.58256/zaxxt878>
- Panuju, R. (2023). Podcast Politik Indonesia: Upaya Mencari Calon Presiden Indonesia 2024. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 5(1), 53–66. <https://doi.org/10.33366/jkn.v5i1.222>
- Pratama, A., P., & Swarizona, S. (2022). Demonstrasi Mahasiswa Indonesia Dalam Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 36(2), 107–119.
- Pratama, A. C. J., Febrianita, R., & Chairil, A. M. (2023). Kritik Sosial Pada Pemerintah (Analisis Wacana Kritis Bintang Emon di Kanal Youtube Deddy Corbuzier Episode Somasi). *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 185–198. [https://www.bing.com/search?pglt=43&q=Kritik+Sosial+Pada+Pemerintah+\(Analisis+Wacana+Kritis+Bintang+Emon+di+Kanal+Youtube+Deddy+Corbuzier+Episode+Somasi\)&cvid=57d21b7e80c3487a9c5b7ab76ccea6cd&gs_lcrp=EgRlZGdlKgYIABBFdK yBggAEEUYOdIBBzY1NmowajGoAgCwAgA&FOR](https://www.bing.com/search?pglt=43&q=Kritik+Sosial+Pada+Pemerintah+(Analisis+Wacana+Kritis+Bintang+Emon+di+Kanal+Youtube+Deddy+Corbuzier+Episode+Somasi)&cvid=57d21b7e80c3487a9c5b7ab76ccea6cd&gs_lcrp=EgRlZGdlKgYIABBFdK yBggAEEUYOdIBBzY1NmowajGoAgCwAgA&FOR)
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme. *Jurnal Konstitusi*, 19(2),

- Putri, A. A., & Subadri, I. H. (2021). Analisis Wacana Kritis Theo Van Leeuwen Kasus Baku Tembak Anggota Laskar FPI. *Klitika: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 35(2), 12–21. <http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/klitika10.32585/klitika.v3i2.1144>
- Rajasa, A. J., & Ramadhan, M. A. (2024). *Peran Aktivisme Digital dalam Mendorong Revisi UU ITE di Indonesia: Studi Kasus Gerakan #StopKriminalisasi dan #RevisiUUITE*. https://www.researchgate.net/profile/Azril-Jaya-Rajasa/publication/386564510_Peran_Aktivisme_Digital_dalam_Mendorong_Revisi_UU_ITE_di_Indonesia_Studi_Kasus_Gerakan_StopKriminalisasi_dan_RevisiUUITE/links/6756b072ef2dc67228b516fe/Peran-Aktivisme-Digital-da
- Rizkiah, R., Sumadinata, R. W. S., & Djuyandi, Y. (2021). Gerakan Mahasiswa: Studi Tentang Aliansi Cipayung Kota Bandung Dalam Aksi Bandung Darurat Korupsi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 1292–1299. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i3.551>
- Sahal, U. (2026). *Psikolog UMSURA Jelaskan Kasus Siswa SD di NTT yang Ditemukan Gantung Diri | Universitas Muhammadiyah Surabaya*. Um-Sura.Ac.Id. <https://www.um-surabaya.ac.id/article/psikolog-umsura-jelaskan-kasus-siswa-sd-di-ntt-yang-ditemukan-gantung-diri>
- Sanjaya, A. R., Banimal, A. H., Fundrika, B., Ningtyas, I., Saputri, N., Arum, N. S., Andaru, N. F., Supriyono, & Sagena, U. (2021). Represi Digital di Tengah Pandemi. In *SAFEnet*. <https://id.safenet.or.id/2021/04/laporan-situasi-hak-hak-digital-indonesia-tahun-2020-represi-digital-di-tengah-pandemi/>
- Septia, S. N. (2025). Dari Klik ke Konstitusi: Peran Mahasiswa dalam Aktualisasi Nilai Pancasila pada Sistem Hukum Tata Negara Modern. *Journal of Society and Scientific Studies*, 1(2), 1–8. <https://doi.org/10.62504/scientiva11>
- Setyowati, R. M., Safira, C., & Pramucitra, S. (2023). Tantangan Kerja Jurnalis Dalam Keamanan Siber. *Janaloka: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2 DESEMBER), 97. <https://doi.org/10.26623/janaloka.v1i2desember.8279>
- Sholikhah, N. I. (2024). Delegitimasi Wacana Kekerasan Seksual Komnas Perempuan di Media Sosial oleh Warganet pada Kasus Ferdy Sambo. *Iptek-Kom*, 25(1), 121–136.
- Sihombing, R. A., Nainggolan, S. E., Farasi, T. A., Jesica, V., Affandi, Y. P., Ritonga, M. U., & Arianto, T. (2026). ANALISIS WACANA KRITIS PEMBERITAAN HUKUM DI MEDIA ONLINE: KAJIAN TEORI NORMAN FAIRCLOUGH. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 7(2), 2593–2603.
- Siregar, M., Wijaya, U., Surabaya, K., & Java, E. (2026). Narasi Green Development dalam Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia: Analisis Wacana Kritis atas Kebijakan dan Kontestasi Makna. *SOSHUMDIK*, 5(1), 161–181.
- Sudiana, Y., & Muhazir, A. (2021). Makna Tahun Represi Digital Dalam Cover Koran Tempo Edisi 21 Oktober 2020. *AGUNA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 63–74. <https://ejournal.amikompurwokerto.ac.id/index.php/AGUNA>
- Sufri Eka Bhakti. (2020). Ruang publik dan media sosial: partisipasi politik mahasiswa indonesia. *Jurnal Kajian Media*, 4(1), 2–3.

- Suryawati, I. (2021). Politik Entertainment Selebriti Parlemen Pusat Dalam Konstruksi Media Online (Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough). *Jurnal Ilmiah Manajemen Informasi Dan Komunikasi*, 5(5).
- Syafruddin, N. I., Amir, J., & Azis. (2021). Kajian Pemberitaan Dugaan Korupsi dalam Dunia Pendidikan: Analisis Wacana Kritis Theo Van Leeuwen. *Wahana Literasi: Journal Language, Literature, and Linguistics*, 1(1), 35–44.
- Utomo, A. M., & Batanghari, M. A. N. (2024). Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough terhadap Representasi Bahasa Masyarakat dalam Pemberitaan Geng Motor. *DIKBASTRA: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 7(2), 1–7.
- Vogiatzis, A. (2025). Metaphoric delegitimization of the EU in Political Discourse on Social Media. *European Journal of Applied Linguistics*, 13(1), 197–226. <https://doi.org/10.1515/eujal-2023-0052>
- Wiratraman, H. P. (2023). Kebebasan Pers, Hukum, dan Politik Otoritarianisme Digital. *Jurnal Hukum*, 6(1), 1–31. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.1-31>
- Yudha, A. A. N. B. K., & Yogantari, M. V. (2026). Retorika Kuasa Menuju Budaya Resistensi Digital: Krisis Komunikasi Pejabat Indonesia pada Media Massa. *Warta ISKI*, 8(2), 445–458. <https://doi.org/10.25008/wartaiski.v8i2.362>
- Yulianti, A. I., & Firdaus, W. (2019). Ungkapan Keprihatinan dalam “Maklumat Akal Sehat” (Analisis Wacana Kritis terhadap Maklumat Rocky Gerung dkk). *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 8(1), 93. <https://doi.org/10.26499/rnh.v8i1.961>
- Zulfa Annisa Rahmadhani, & Kusumasari, B. (2023). Aktivisme digital kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 7(2), 662–681. <https://doi.org/10.25139/jsk.v7i2.5323>